

**KAPASITAS KELEMBAGAAN EKONOMI DALAM PENGEMBANGAN DESA
WISATA UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH
(STUDI PADA DESA WISATA TEMBI KABUPATEN BANTUL PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**

**ECONOMIC INSTITUTION CAPACITY IN DEVELOPING TOURISM VILLAGE TO
REALIZE REGIONAL ECONOMIC RESILIENCE
(STUDY IN TEMBI TOURISM VILLAGE, BANTUL, D. I. YOGYAKARTA)**

Kurnia Dewi Swapradinta¹, Djoko Andreas Navalino², Jupriyanto³

Program Studi Ekonomi Pertahanan Universitas Pertahanan

(kurnia.swapradinta@mp.idu.ac.id)

ABSTRAK

Desa Wisata merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pengembangan destinasi dan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat menarik minat wisatawan dengan kekhasan daerah seperti kebudayaan, kondisi alam atau wisata sejarah yang ditawarkan. Pengembangan desa dengan memberdayakan masyarakat setempat dapat memberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi aktif dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Sehingga pengembangan desa wisata diharapkan dapat berdampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi dan pembangunan serta menjadi langkah alternatif untuk mencapai kesejahteraan. Pengembangan desa wisata salah satunya dipengaruhi oleh adanya kelembagaan di desa wisata tersebut. Penelitian ini menganalisis kapasitas kelembagaan ekonomi dan struktur kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah studi pada Desa Wisata Tembi, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur kelembagaan yang digunakan desa wisata dan kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah. Penelitian dilakukan melalui wawancara, pengamatan dan penggunaan dokumen yang ada. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kelembagaan telah menggambarkan program dan tujuan pengembangan desa wisata, kapasitas kelembagaan ekonomi telah menunjukkan kompetensi yang optimal dalam pengelolaan potensi wisata, dan kompetensi pokdarwis dalam memanfaatkan potensi lokal meliputi kekayaan alam didukung sarana dan prasarana sudah maksimal sehingga dapat memperluas kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas sehingga meningkatkan perwujudan ketahanan ekonomi daerah.

Kata kunci: kapasitas, kelembagaan ekonomi, desa wisata, ketahanan ekonomi daerah.

¹ Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Industri Pertahanan, Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

ABSTRACT

Tourism Village is one of the strategic policies in developing destinations and the tourism sector carried out by the Ministry of Tourism. Development of tourist villages is expected to attract tourists with regional specialties such as culture, natural conditions or historical tourism offered. Village development by empowering local communities can provide opportunities to actively participate in building and developing existing tourism potential. So that the development of tourism villages is expected to have a positive impact on economic sustainability and development as well as being an alternative step to prosperity. One of the development of tourist villages is influenced by the existence of institutions in the tourist village. This study analyzes the economic institutional capacity and economic institutional structure in the development of tourist villages to realize the economic resilience of the study area in Tembi Tourism Village, Bantul Regency, Yogyakarta Special Province. The purpose of this study was to determine the institutional structure used by tourism villages and economic institutional capacity in the development of tourism villages. It is hoped that it can contribute to community welfare and regional economic resilience. Research is carried out through interviews, observation and use of existing documents. This research approach uses descriptive qualitative methods. The results showed that the institutional structure had described the program and the purpose of tourism village development, economic institutional capacity had demonstrated optimal competence in managing tourism potential, and Pokdarwis competence in utilizing local potential including natural wealth was supported by maximum facilities and infrastructure so as to expand employment opportunities and capacity building so as to enhance the realization of regional economic resilience.

Keywords: **capacity, economic institutions, tourism villages, regional economic resilience.**

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang panjangnya lebih dari 95.181 km dan jumlah pulau sebanyak 13.446 pulau. Indonesia memiliki kurang lebih lebih 1.128 suku bangsa, 746 bahasa daerah, dan dialek serta berbagai adat budaya serta tradisi yang ada adalah laboratorium budaya paling besar di dunia. Bahkan terdapat 8 budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia sebagai world cultural heritage.⁴ Bahkan

keindahan alam Indonesia merupakan daya saing tersendiri karena sudah dikenal dunia sehingga dapat menempati peringkat ke 14 dalam *Travel and Tourism Competitiveness Index* tahun 2017 yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum*.⁵

Saat ini, berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata tahun 2017, sektor pariwisata berkontribusi sebesar 5% dari ekspor negara, sehingga pemerintah telah

⁴ Kementerian Pariwisata, *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata*

Tahun 2015-2019, (Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015), hlm 20.

⁵ World Economic Forum, *The Travel and Tourist Competitiveness Report 2017*, (Geneva: World Economic Forum, 2017), hlm 40.

mengakui potensi yang ada pada sektor pariwisata dan menginvestasikan sekitar 9% dari anggaran untuk sektor ini. Tren kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto Nasional terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, kontribusi sektor pariwisata semakin meningkat yaitu sebesar kurang lebih 5% terhadap PDB Nasional atau sebesar 679,44 triliun rupiah. Sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap devisa sebesar 205,04 triliun rupiah. Penerimaan devisa pariwisata ini bila dibandingkan dengan komoditi ekspor lainnya berada di peringkat ketiga setelah batu bara dan minyak kelapa sawit. Selain itu, sektor pariwisata juga memiliki keunggulan karena merupakan sektor berkelanjutan yang mampu menyetuh semua level di masyarakat sehingga sektor ini mampu menyerap hingga 12 juta orang tenaga kerja.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari *United Nation World Tourism Organization*, pertumbuhan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2017 tercatat terus meningkat hingga mencapai 14,04 juta kunjungan atau naik sebesar 16,77% bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan wisatawan dalam negeri sejumlah 277 juta perjalanan. Kecenderungan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara masih akan terus meningkat.

Indonesia memiliki potensi pasar yang lebih besar dengan kekayaan alam dan wisata budaya yang dimiliki Indonesia. Akan tetapi, Indonesia masih belum dapat mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki tersebut karena permasalahan utama sektor wisata yaitu rendahnya daya saing. Berdasarkan data *Travel and Tourism Competitive Index* yang diterbitkan *World Economic Forum*, secara keseluruhan peringkat sektor pariwisata Indonesia berada di posisi 42 masih berada di bawah Singapura yang menempati posisi 13, Malaysia peringkat 26 dan Thailand pada posisi 34.⁷ Sehingga untuk dapat mencapai target peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan meningkatkan daya saing, pada tahun 2018 Pemerintah telah membuat kebijakan strategis dengan focus utama pada pengelolaan *Go Digital Tourism*, *Air Connectivity* dan *Desa Wisata*.⁸

⁶ Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, *Op Cit*, hlm 2.

⁷ World Economic Forum, *Op Cit*, hlm 40.

⁸ *Ibid.*, hal. 101.

Desa Wisata merupakan salah satu kebijakan strategis dalam pengembangan destinasi dan sektor pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat menarik minat wisatawan dengan kekhasan daerah seperti kebudayaan, kondisi alam atau wisata sejarah yang ditawarkan. Pengembangan desa dengan memberdayakan masyarakat setempat dapat memberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi aktif dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata yang ada. Sehingga pengembangan desa wisata diharapkan dapat berdampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi dan pembangunan. Akan tetapi, pada kenyataannya pengembangan desa wisata belum berpihak pada masyarakat setempat. Masuknya investor dari luar desa menciptakan sebuah daerah kompetisi ekonomi. Kompetisi terjadi tidak hanya dalam hal lapangan pekerjaan namun juga dalam kepemilikan modal. Warga desa setempat akan bersaing dengan pemilik modal kuat dari luar desa. Jika keadaan terus berlanjut maka akan menimbulkan kesenjangan antara masyarakat desa setempat

dengan pemilik modal dari luar dan pemilik modal dari luar desa dapat menguasai seluruh potensi yang ada di desa tersebut.

Pengembangan desa wisata diharapkan dapat menjadi langkah alternatif untuk dapat menumbuhkan perekonomian serta untuk mencapai kesejahteraan dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat setempat dalam desa wisata tersebut. Pengembangan desa wisata dipengaruhi oleh empat aspek yaitu, kekhasan daerah, kelembagaan, objek dan daya tarik desa wisata serta sarana prasarana wisata. Dalam pengembangan desa wisata, kelembagaan ekonomi masyarakat dapat menjadi komponen penting dalam menentukan keberhasilan pariwisata karena merupakan lembaga yang dapat dipercaya sebagai agen perubahan.

Kelembagaan ekonomi yang dibahas dalam penelitian ini adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Pokdarwis menjadi komponen penting dalam pengembangan desa wisata karena keseluruhan proses pembangunan dan perkembangan tidak lepas dari peran aktif Pokdarwis untuk memberdayakan masyarakat dan mengelola potensi wisata yang ada.

Peran Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata merupakan sebuah sarana untuk memperluas lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan potensi wisata yang ada dan peran pokdarwis maka akan tercipta pembangunan dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah. Sehingga pengembangan desa wisata dengan kelembagaan yang ada dapat mewujudkan produktivitas daerah yang mampu mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

Berdasarkan observasi awal serta studi literatur terkait dengan permasalahan di atas, ditemukan fakta permasalahan adanya investor dari luar desa sehingga diperlukan upaya dari Pokdarwis dalam pengembangan desa wisata untuk mengelola potensi yang ada, memberdayakan masyarakat. Sehingga nantinya dapat menciptakan desa wisata yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan produktivitas daerah yang mampu mendukung pertumbuhan daerah dan ketahanan ekonomi nasional.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis struktur kelembagaan ekonomi, kapasitas kelembagaan

ekonomi, dan kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah pada Desa Wisata Tembi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar mendapatkan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai kapasitas kelembagaan ekonomi yang ada. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah individu sekelompok orang sebagai masalah sosial atau kemanusiaan.⁹ Fokus utama penelitian ini adalah menjelaskan tingkat kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata pada Desa Wisata Tembi. Penelitian ini didasari bahwa kelembagaan ekonomi dapat membawa dampak yang cukup besar dalam pengembangan desa wisata. Penelitian ini berusaha untuk memahami bagaimana bentuk kelembagaan ekonomi dan kapasitasnya dalam desa wisata sebagai bentuk pengembangan

⁹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 3.

desa wisata yang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap produktivitas dalam mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

Penelitian ini juga dipertajam dengan wawancara terhadap Penasihat dan Ketua Pokdarwis serta Tokoh Masyarakat setempat untuk mendapatkan gambaran mengenai kapasitas kelembagaan ekonomi. Pemilihan informan ini dilakukan secara *purposive*. Selain melalui wawancara mendalam dalam mendapatkan data, peneliti juga ingin mendapatkan informasi berdasarkan observasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi, suasana, dan lingkungan di sekitar tempat penelitian. Sebagai penunjang, peneliti juga menggunakan data sekunder untuk menjelaskan isu dalam artikel ini.

PEMBAHASAN

Studi mengenai kelembagaan ekonomi yang menjadi hal penting dalam keberlanjutan institusi lembaga lokal. Norman Uphoff dan Louise Buck¹⁰ mungkin menjadi salah satu peneliti yang menggambarkan mengenai keberadaan

kelembagaan, fungsi dan kapasitas kelembagaan. Dalam pandangannya, kelembagaan ekonomi adalah organisasi lokal yang dapat menggerakkan masyarakat sehingga mendorong keberlanjutan institusi lembaga lokal pedesaan.

Struktur Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata Tembi

Desa Wisata Tembi memang telah banyak memikat wisatawan untuk datang mengeksplorasi pemandangan alam persawahan yang masih asri dan indah. Akan tetapi selain wisata alam, terdapat juga potensi wisata yang lain seperti budaya dan tradisi asli yang masih dipertahankan seperti arsitektur bangunan tradisional rumah Joglo dan berbagai macam peralatan tradisional yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat Jawa pada jaman dulu. Keberhasilan dalam proses pengembangan desa wisata tidak terlepas dari peran sebuah institusi lokal atau atau kelembagaan ekonomi yang mengelola desa wisata tersebut. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas pariwisata di Desa Wisata Tembi yaitu Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Desa Wisata Tembi.

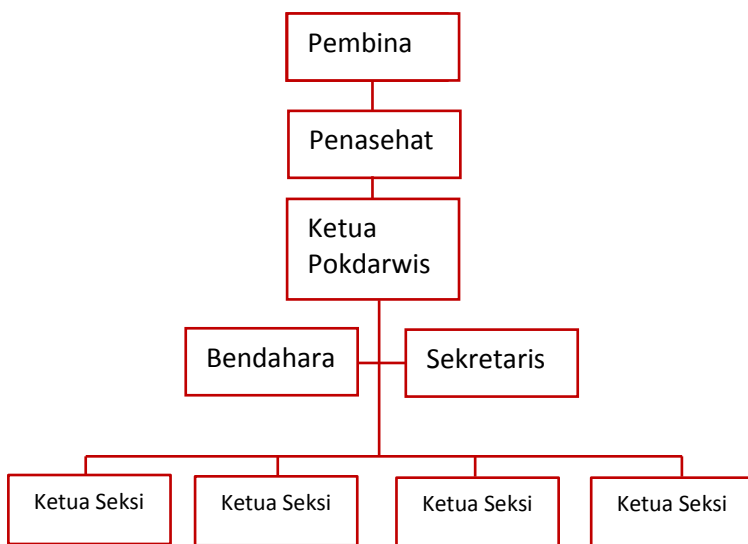
¹⁰ Uphoff N, Louise B, *Strengthening Rural Local Institutional Capacities*, (Washington, DC: Cornell International Institute for Food, Agriculture and Development (CIIFAD), 2006), hlm 9.

Pokdarwis Desa Tembi memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pembina, Penasihat, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua Seksi Kegiatan serta anggota yang merupakan masyarakat Dukuh Tembi. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai Pembina, Bapak Lurah dan Bapak Dukuh sebagai Penasihat, Bapak Dawud Subroto sebagai Kepala Pengelola Desa Wisata dan Ketua Kelompok Sadar Wisata, Bapak Mulyani sebagai Bendahara, Bapak Aris Langgeng sebagai Sekretaris, serta Bapak Acuy sebagai Sekretaris dan Koordinator Ketua Seksi Kegiatan.

Keberadaan Pokdarwis pada awalnya merupakan pengelolaan kawasan wisata terintegrasi di Kabupaten Bantul yang dikenal dengan nama Kawasan GMT (Gabusan, Manding dan Tembi). Kawasan ini memiliki fungsi untuk mengkoordinasikan dan membangun pariwisata terpadu di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Kemudian dengan adanya Kawasan GMT ini terbentuk pembagian daerah tujuan wisata berdasarkan potensi yang dimiliki dan Dukuh Tembi ditetapkan sebagai desa wisata berbasis budaya dan kesenian. Seiring dengan berjalannya waktu, masing-masing dusun pada Kawasan GMT dapat berdiri sendiri.

Terbentuknya Pokdarwis Desa Wisata Tembi pada tahun 2010 kemudian menjadi lembaga yang memegang tanggung jawab dalam keseluruhan aktivitas manajerial mulai dari perencanaan hingga pengembangannya. Selain itu, Peran Pokdarwis terlihat dalam pengelolaan potensi yang ada di desa wisata, peningkatan kualitas program atraksi wisata, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung pengembangan desa wisata.

Menurut Erani, kelembagaan merupakan konsep norma atau hak alami



Gambar 1. Struktur Organisasi Kelompok Sadar Wisata Desa Wisata Tembi

Sumber : Data Diolah, 2019

yang mengontrol tingkah laku dari individu. Definisi mengenai kelembagaan juga dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, apabila kelembagaan dimaknai berdasarkan prosesnya, sehingga kelembagaan merupakan sebuah upaya untuk membentuk sistem dalam berinteraksi antar pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi. Sedangkan bila dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, kelembagaan lebih berfokus untuk meningkatkan efisiensi sesuai dengan struktur kewenangan antar pelaku. Akan tetapi kelembagaan juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang memiliki nilai tambah terhadap perekonomian.¹¹ Upaya pembentukan sistem dalam interaksi antar pelaku kegiatan tersebut diimplementasikan atau diwujudkan dengan terbentuknya Pokdarwis Desa Tembi yang terdiri dari para pengurus harian serta anggota yang merupakan masyarakat Dukuh Tembi. Sedangkan bila berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka Kelompok Sadar Wisata memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan pengembangan desa wisata untuk mewujudkan desa wisata yang

¹¹ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm 25.

berkelanjutan serta tercapai peningkatan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan.

Sedangkan menurut Djogo, Sunaryo dan Sirait, kelembagaan merupakan sebuah rancangan pola dalam berperilaku secara sosial yang sudah tertanam dan terus berulang dalam jangka waktu cukup lama. Kelembagaan terdiri dari dua bagian utama yaitu kelembagaan dan keorganisasian. Dari segi kelembagaan berupa tingkah laku sosial yang pembahasan utamanya mengenai norma, kepercayaan, nilai, gagasan, doktrin, kebutuhan, orientasi, keinginan dan lain sebagainya. Sedangkan segi keorganisasian berupa struktur sosial dimana pembahasan utamanya mengenai peran, kegiatan, interaksi dari masing-masing peran, bauran sosial, perbandingan struktur secara teori dengan yang terjadi di sebenarnya, struktur pola kewenangan dan kekuasaan, sisi solidaritas serta kaitan antara aktivitas dengan tujuan yang ingin dicapai.¹² Dari segi kelembagaan maka dapat dilihat melalui karakteristik khusus

¹² Gita Ratri Prafitri dan Maya Damayanti, "Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)", *Jurnal Pengembangan Kota*, Volume 4, Nomor 1, 2016, hlm 2.

yang ada pada desa wisata yaitu adanya modal sosial seperti nilai-nilai, adat istiadat dan norma-norma masyarakat yang khas sebagai dasar dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama masyarakat desa wisata maupun dengan wisatawan. Penguatan modal sosial dengan pemberdayaan masyarakat desa wisata merupakan solusi supaya modal sosial yang menopang desa wisata tidak hilang dan tetap terjaga dan desa wisata dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Dari segi keorganisasian maka sejalan dengan Erani, kelembagaan diwujudkan dengan adanya Pokdarwis Desa Tembi yang terdiri dari para pengurus harian serta anggota yang merupakan masyarakat Dukuh Tembi yang memiliki peran masing-masing dalam pengembangan desa wisata.

Pentingnya keberadaan Kelompok Sadar Wisata dituangkan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 18 Tahun 2015 yaitu Kelompok Sadar Wisata dapat dimengerti sebagai kelompok yang muncul berdasarkan inisiatif, kemauan, kemampuan, dan kesadaran masyarakat untuk ikut terlibat dalam pemeliharaan dan pelestarian berbagai macam obyek

dan daya tarik wisata yang ada dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan di daerah tempat tinggal masyarakat tersebut.

Pembentukan kelompok sadar wisata ini menggunakan sistem *bottom-up*. Dimana pembentukan kelompok sadar wisata dilakukan berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Tembi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan berfungsi sebagai fasilitator. Sehingga dengan adanya keberadaan Pokdarwis, Pemerintah telah mengupayakan pengembangan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dengan berbagai program-program pembangunan di bidang pariwisata. Program pengembangan juga dilakukan oleh Pokdarwis Desa Tembi sendiri diantaranya kegiatan pelestarian, pemeliharaan dan pengelolaan potensi wisata budaya dan kerajinan yang ada, peningkatan kualitas dan kuantitas program atraksi wisata yang merupakan inisiatif dari pengurus Pokdarwis, serta pelibatan peran serta masyarakat dalam memelihara potensi yang ada dan menciptakan atraksi wisata baru.

Beberapa capaian telah diperoleh Desa Wisata Tembi sebagai hasil dari berbagai uraian kegiatan dalam pengembangan desa wisata yang telah dilakukan oleh Pokdarwis Desa Tembi. Beberapa capaian tersebut diantaranya Desa Wisata Tembi memperoleh penghargaan *Asean Homestay Standard* pada tahun 2016 dan 2019 dari *Asean Tourism Forum*. Dengan capaian yang diperoleh ini maka hasil penelitian menunjukkan bahwa peran, fungsi dan struktur kelembagaan ekonomi pada Pokdarwis telah sesuai dengan program dan tujuan yang ditetapkan pada Desa Wisata Tembi. Tujuan untuk mengakomodir sapa pesona dalam pariwisata, meningkatkan kesejahteraan bersama bahkan menjadikan Desa Wisata Tembi bertaraf Internasional dapat tercapai dan dirasakan oleh keseluruhan anggota.

Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata Tembi

Kapasitas Kelembagaan merupakan kemampuan organisasi dalam pengembangan desa wisata yang dipengaruhi oleh pengelolaan dan dukungan, peraturan yang diterapkan dalam kelembagaan, perubahan

kelembagaan serta syarat dan aturan yang diterapkan kelembagaan dalam lingkungan sosial. Kapasitas Kelembagaan dapat ditunjukkan dengan Pokdarwis menjadi lembaga yang tampil paling dominan di dalam penyelenggaraan atau beberapa aktivitas pengembangan wisata sehingga Pokdarwis ini dapat menjadi *local champion* yaitu individu atau kelompok setempat dengan kepeloporannya yang tinggi mampu menggerakkan masyarakat untuk mendukung kinerja Pokdarwis dan berpartisipasi pada suatu aktivitas pengembangan wisata di daerah tempat tinggalnya.

Menurut Milen, Kapasitas Kelembagaan merupakan level dalam organisasi yang berkaitan dengan struktur, budaya dan sistem tata kelola organisasi sehingga dapat mendukung individu untuk menunjukkan kompetensi yang maksimal. Sedangkan Menurut Damanik dan Weber, Kapasitas Kelembagaan merupakan kepelembagaan organisasi dalam proses kepemimpinan dan koordinasi, melakukan kerjasama eksternal, mengembangkan serta melakukan promosi pada produk dan

destinasi wisata.¹³ Kapasitas kelembagaan ekonomi Pokdarwis telah ditunjukkan dalam proses pengelolaan dan dukungan Wisata terhadap potensi, daya tarik wisata serta sarana dan prasarana yang ada pada Desa Wisata Tembi.

Dukungan tersebut diwujudkan dalam pengelolaan dan dukungan awal dilakukan pada objek dan daya tarik wisata di Desa Wisata Tembi melalui pengelolaan rumah-rumah adat yang masih ada. Tahap selanjutnya dilakukan dengan mengadakan pelatihan pembimbingan kepada masyarakat dalam penerimaan wisatawan baik dan pengelolaan homestay yang sesuai dengan standard. Pembinaan awal dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul. Setelah itu pelatihan dilakukan oleh beberapa Universitas melalui kegiatan KKN di Desa Wisata Tembi. Pokdarwis Desa Tembi juga turut memberikan pembinaan standarisasi homestay melalui kegiatan Lomba Homestay. Kemudian dukungan dan pengelolaan desa wisata dilakukan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas program atraksi wisata yang merupakan inisiatif dari pengurus

Pokdarwis. Beberapa atraksi yang berhasil diadakan diantaranya seni tari, kesenian karawitan, kesenian bangbong (alat musik yang berasal dari bambu), kesenian gejog lesung (kesenian yang berasal dari aktivitas tumbuk gabah), kerajinan handycraft (membatik kain, membatik topeng, membuat tempat pensil dan tempat tisu, membuat keramik/tembikar, mewarnai tembikar, tatah sungging wayang serta membuat dan melukis kipas).

Berkaitan dengan peraturan formal maupun nonformal yang diterapkan dalam kelembagaan Pokdarwis hingga saat ini tidak terdapat aturan formal yang secara baku tertulis. Pokdarwis masih menggunakan aturan nonformal berupa nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat sejak dulu. Pengurus Pokdarwis Desa Tembi dan warga masih menjunjung tinggi rasa solidaritas. Sehingga adanya pengelolaan kegiatan pariwisata dilakukan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip informal lain yang diterapkan oleh Pokdarwis berupa prinsip sebagai penyelenggara dan pengelola desa wisata yaitu kesiapan dalam menerima wisatawan yang datang. Pokdarwis dan

¹³ Gita Ratri Prafitri dan Maya Damayanti, *Op Cit.* hlm 3.

anggota masyarakat harus mampu menjadi tuan rumah untuk setiap wisatawan yang berkunjung. Pengurus Pokdarwis dan masyarakat harus memiliki kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan bidang usaha serta dapat memberikan pelayanan informasi kepada wisatawan.

Berkaitan dengan perubahan yang terus terjadi di industri pariwisata bahkan di dunia sesuai dengan aktivitas dan hambatan yang ada maka Pengurus Pokdarwis terus melakukan koordinasi untuk mengembangkan strategi-strategi baru dalam menghadapi perkembangan yang ada. Sehingga Desa Wisata Tembi dapat menjadi desa wisata yang berkelanjutan dan terus dapat menarik wisatawan. Salah satu strategi yang dilakukan Pokdarwis adalah dengan rutin melakukan pertemuan untuk membahas mengenai perkembangan pariwisata saat ini. Pertemuan ini dilakukan sebagai sarana untuk menyampaikan ide-ide baru dalam pengembangan desa wisata. Ide-ide yang disampaikan pengurus melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing desa wisata agar terus dapat bertahan dalam persaingan di bidang pariwisata.

Pengembangan strategi dan pengelolaan desa wisata juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Atraksi Wisata dapat dikatakan berhasil ketika pelaku memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni. Peningkatan kemampuan dan pengetahuan harus melalui beberapa proses transfer pengetahuan kepada generasi berikutnya agar peningkatan kualitas sumber daya manusia merata. Dengan berbagai strategi yang diterapkan dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata, maka diketahui bahwa kapasitas kelembagaan ekonomi pada Pokdarwis telah menunjukkan kompetensi yang maksimal dalam proses kepemimpinan, koordinasi, kerjasama, pengembangan dan promosi pada desa wisata.

Kapasitas Kelembagaan Ekonomi dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah

Konsep ketahanan nasional sebagai metode pemecahan persoalan pembangunan diformulasikan menjadi kekayaan alam, sumber daya manusia,

sarana dan prasarana serta manajemen.¹⁴ Keempat elemen ini penting dalam mendukung pengembangan desa wisata sekaligus mewujudkan ketahanan ekonomi daerah.

Dusun Tembi dengan kondisi geografis yang masih alami didominasi dengan persawahan berpotensi dikembangkan menjadi objek wisata. Daya tarik alam Desa Wisata Tembi sebagai salah satu faktor yang menentukan keanekaragaman hayati baik tumbuhan maupun hewan, dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh kelompok sadar wisata sebagai potensi wisata. Sesuai dengan pengertian Sumber Daya Alam yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup¹⁵ yakni unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Selain adanya kekayaan alam, ketahanan ekonomi juga harus didukung dengan adanya sumber daya manusia.

Kapasitas kelembagaan ekonomi dalam pengembangan desa wisata memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih baik. Ketersediaan tenaga kerja dapat menjadi penggerak pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹⁶

Dengan adanya kekayaan alam serta terbukanya kesempatan kerja yang diciptakan dari pengembangan desa wisata maka akan meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam serta terbukanya unit usaha sesuai potensi yang dimiliki oleh desa wisata membuka kesempatan penggunaan tenaga kerja lokal. Kontribusi desa wisata dalam menciptakan lapangan pekerjaan adalah dengan adanya unit-unit kegiatan di desa wisata yang tentunya membutuhkan tambahan tenaga kerja.

Dengan adanya pengelolaan *homestay* dan unit kegiatan ini membuka lapangan kerja dan penyerapan tenaga

¹⁴ Amin Ibrahim, *Model Ketahanan Nasional Sebagai Model Administrasi Negara Untuk Memberdayakan Otonomi Daerah*, (Bandung : Mandar Maju, 2006), hlm.35.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁶ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

kerja di desa dan dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Di Desa Wisata Tembi saat ini tersedia 92 *homestay* non ac milik warga dengan *rate* harga Rp 75.000,00. Jika jumlah wisatawan yang datang setiap bulannya berkisar 600 pengunjung pada hari-hari biasa. Maka perputaran uang yang masuk ke Desa Wisata tiap bulan dari pengelolaan *homestay* sebesar Rp 45.000.000,00. Dengan pemasukan ini maka dapat menambah penghasilan warga masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan.

Selain itu adanya sarana prasarana dan kelembagaan berperan dalam pemanfaatan terhadap kekayaan dan tenaga kerja. Sarana dan prasana menjadi alat penunjang dalam mempercepat pengembangan potensi objek wisata. Sarana dan prasarana juga terkait dengan fungsi dan tujuan yang menggambarkan kapasitas dari kelompok sadar wisata. Pengembangan sarana dan prasarana Desa Wisata Tembi telah terbangun melalui peran aktif Kelompok Sadar Wisata Desa Tembi. Akan tetapi Pokdarwis akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada kapasitasnya dalam pengelilaan dan

kepengurusan melalui bimbingan, pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mencapai tujuan Desa Wisata Tembi. Perbaikan kapasitas Pokdarwis Desa Tembi telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul terhadap pengurus Kelompok Sadar Wisata.

Dapat disadari bahwa peluang dan kesempatan pemanfaatan kekayaan alam sangat luas bila dikembangkan oleh Pokdarwis Desa Wisata Tembi sehingga dapat bermanfaat dalam perluasan lapangan pekerjaan. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai disadari juga dapat memperkuat kapasitas Pokdarwis dalam pengembangan desa wista untuk mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Sehingga diketahui dari beberapa pandangan diatas, kapasitas kelembagaan ekonomi dalam hal ini Pokdarwis untuk memanfaatkan potensi lokal meliputi kekayaan alam didukung sarana dan prasaran telah dilakukan secara maksimal sehingga dapat memperluas kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas sehingga meningkatkan perwujudan ketahanan ekonomi daerah.

KESIMPULAN

1. Peran, fungsi dan struktur kelembagaan ekonomi pada Kelompok Sadar Wisata telah sesuai dengan program dan tujuan yang ditetapkan pada Desa Wisata Tembi. Tujuan untuk mengakomodir sapta pesona dalam pariwisata, meningkatkan kesejahteraan bersama bahkan menjadikan Desa Wisata Tembi bertaraf Internasional dapat tercapai dan dirasakan oleh keseluruhan anggota.
2. Kapasitas kelembagaan ekonomi pada Kelompok Sadar Wisata telah menunjukkan kompetensi yang maksimal. Hal ini tercermin dalam proses kepemimpinan, koordinasi, kerjasama, pengembangan dan promosi pada desa wisata.
3. Pokdarwis telah memanfaatkan potensi lokal meliputi kekayaan alam didukung sarana dan prasaran secara maksimal sehingga dapat memperluas kesempatan kerja serta peningkatan kapasitas sehingga meningkatkan perwujudan ketahanan ekonomi daerah.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Temuan potensi wisata yang masih terbatas pada kebudayaan dan pengelolaan *homestay*, sehingga diharapkan dapat dikembangkan pengelolaannya dengan mencontoh prototipe desa wisata yang sudah berkembang dikelola oleh BUMDES dan menciptakan unit-unit usaha baru yang berkembang menjadi lembaga ekonomi.
2. Temuan karakteristik wilayah yang belum dimanfaatkan sebagai potensi wisata terlalu dibatasi di lingkup Desa Wisata Tembi, sehingga diharapkan penelitian berikutnya meningkatkan cakupan pada lingkup Desa Wisata lain atau skala Kabupaten serta Provinsi sehingga memperlihatkan sinergitas pemerintah dan pihak lainnya.
3. Temuan usaha wisata yang belum dimaksimalkan Desa Wisata dapat diperluas menjadi unit wisata yang lain sehingga diharapkan nantinya kelanjutan penelitian dapat merepresentasikan keseluruhan

dampaknya bagi ketahanan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Ibrahim, Amin. 2006. *Model Ketahanan Nasional Sebagai Model Administrasi Negara Untuk Memberdayakan Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 2015. *Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019*. Jakarta.
- World Economic Forum. 2017. *The Travel and Tourist Competitiveness Report 2017*. Geneva.

Tesis

- Andro, Erin. 2017. "Working Around Life: Satisfaction With Precarious Work In The Millennial Generation". *Tesis Magister*. Ohio: Degree of Master of Arts.

Jurnal, Prosiding, Karya Ilmiah

- Prafitri dan Damayanti. 2016. "Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas)", *Jurnal Pengembangan Kota*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Uphoff and Louise. 2006. "Strengthening Rural Local Institutional Capacities", Paper prepared for the Social Development Department of the World Bank, Washington, DC.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.